

KETAHANAN MASYARAKAT KOTA SOLO (Model Pengelolaan Konflik Tionghoa – Jawa melalui Pendekatan Ketahanan Masyarakat)

Atik Catur Budiati
Pendidikan Sosiologi-Antropologi FKIP
Universitas Sebelas Maret

Abstract

In Solo, a conflict which involved Tionghoa-Java is frequently, there is even an opinion that says that the Tionghoa-Java conflict is 15-year conflict cycle events. Therefore, Solo City Government develop community resilience program to create social harmony to prevent conflict. The creation of community resilience in Solo is a social phenomena that serve as an anticipation of all forms of social change, cultural, politics and economics which often leads to violence. One is to manage conflicts of Tionghoa-Java. In hopes, Tionghoa-Java conflicts do not occur again in Solo.

Keywords: *Community Resilience, Conflict Management of Tionghoa - Java*

A. Pendahuluan

Telah menjadi rahasia umum bahwa konflik yang melibatkan etnis Jawa dan Tionghoa sering terjadi. Konflik sosial ini seringkali berujung pada kerusuhan massal (pengrusakan, penjarahan, & kebakaran) yang disertai aksi kekerasan. Tentu saja ini menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun non materiil.

Satu sisi, etnis Jawa merasa dominasi Tionghoa terhadap perekonomian sangat besar. Masyarakat non Tionghoa hanya menjadi kelas nomor dua tanpa mendapatkan kekuasaan dalam monopoli perdagangan. Di sisi lain, adanya diskriminasi secara legal atau hukum dan sosial terhadap orang Tionghoa di Indonesia. Akibatnya konflik antar etnis ini tidak dapat dihindari.

Sepertinya pemahaman masyarakat tentang pluralitas atau kemajemukan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia masih berada di tataran cita-cita. Selain itu

pembicaraan tentang isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) masih dianggap tabu dan dilarang untuk dibicarakan secara terbuka di tingkatan publik. Ironisnya, isu SARA kerap dijadikan “kambing hitam” penyebab munculnya masalah-masalah sosial di Indonesia. (Rahardjo, 2005:8)

Pada era Orde Baru (Orba), Presiden Soeharto menunjukkan keberpihakan yang besar kepada sekelompok pengusaha yang kebanyakan Etnis Tionghoa. Tetapi di sisi lain, kebijakan Orba tentang pelarangan agama, kepercayaan, ekspresi seni, kebudayaan dan sastra cina memberikan bentuk diskriminatif lain bagi Etnis Tionghoa. Padahal, tanpa disadari hal ini menjadi bom waktu bagi terjadinya ledakan chaos sosial. Tragedi Mei 1998 adalah salah satu contohnya.

Menurut Taufik Abdullah, kerusuhan sosial antar etnis memiliki persamaan sebagai peristiwa sosial yang tidak terlepas dari masalah kekuasaan dan cenderung terkait

dengan afinitas atau situasi yang saling ber-gesekan dari ketiga unsur. Pertama, kegelisahan ekonomi yang terkait dengan perbedaan penilaian terhadap keputusan politik. Kedua, kejengkelan politik bersumber pada perbedaan pendapat diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat tentang legalitas kekuasaan politik yang dimiliki penguasa dan perbedaan pandangan atau preferensi terhadap pejabat atau lembaga politik tertentu. Ketiga, kegelisahan sosial yang tidak terkait secara langsung dengan politik, tetapi bersumber pada rasa kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagai akibat ketimpangan manfaat yang diperoleh. (Thung Ju Lan, 1999).

Sampai saat ini, masyarakat non Tionghoa masih memberikan keberadaan yang kurang menguntungkan bagi Etnis Tionghoa. Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang masih tidak jelas dalam menangani persoalan berbasis kultural, berakibat terjadinya berbagai kerusuhan sosial yang akhirnya warga Etnis Tionghoa menjadi sasaran kekerasan. Kebijakan asimilasi yang salah arah, karena dipahami sebagai penyeragaman, memunculkan persepsi bahwa loyalitas masyarakat Tionghoa hanya dapat dicapai melalui pengingkaran identitas kultural mereka. Sebagai etnis minoritas, maka etnis Tionghoa perlu melakukan strategi dan friksi demi memperjuangkan dan mempertahankan identitas budaya yang dimilikinya.

Kota Solo merupakan kota yang pertama kali menciptakan peristiwa rasial anti Cina. Menurut Sejarawan, Sartono Kartodirdjo, pada tahun 1913 dicatat sebagai "lembaran terburam" dalam sejarah Indonesia, sejauh menyangkut kerusuhan-kerusuhan anti Cina (Rahardjo, 2005:104). Puncaknya pada Tragedi Mei 1998. Konflik etnis Tionghoa dan Jawa terus terjadi dan berulang yang biasanya disertai amukan massa (pembakaran, penjarahan, perkosaan dengan kekerasan). Berdasarkan catatan Harian Solo Heritage

Community, Kota Solo di bakar massa sudah terjadi sebanyak tujuh kali yaitu:

1. Tragedi 22 Oktober 1965
Pembantaian 3 pelajar oleh pasukan PKI di depan Benteng Vastenburg oleh Batalyon 444 yang juga dikenal sebagai Batalyon Empat Refting.
2. Kerusuhan Krisis Pangan, 6 November 1966
Dimotori gerakan pemuda kota membongkar gudang sembako di seluruh kota utamanya di Kawasan Tambak Segaran.
3. Tahun 1972
Gegeran abang becak vs pemuda Arab tahun 1972. berdampak di seluruh kawasan pertokoan pasar Pon dan Coyudan di bakar massa
4. Insiden Kerusuhan Pri vs Non Pri di Mesen Tahun 1980
Mengakibatkan munculnya kerusuhan kota yang berkarakter dan bersifat endemis dan patologis sebagai gejala awal munculnya penyakit sosial perkotaan di Solo.
5. Kerusuhan Mei Kelabu 1998
Masih menggambarkan kerusuhan secara endemis dalam ukuran jam, kerusuhan meluas hingga kawasan eks karesidenan Surakarta dan sifat penyakit sosial patologis kerusuhan senantiasa kambuhan pada skala siklus 15 tahunan
6. Kerusuhan November Kelabu 1999
Amuk massa sebagai dampak kekalahan Megawati dalam pencalonan sebagai Presiden
7. Amuk Massa Trek-trekan tahun 2001
Dilakukan oleh kalangan pemuda kota akibat kebut-kebutan di kota. Amuk ini berdampak dibakarnya kantor polisi di tingkat kawasan Gendengan. (Solopos, 17 Mei 2007)

Kerusuhan sosial yang terjadi pada bulan Mei 1998 mengakibatkan kerugian yang

tidak terhitung baik materiil maupun non materiil. Penjarahan, kebakaran, pemerkosaan terhadap perempuan Tionghoa, pengrusakan, pelemparan bom oleh massa yang membabi buta menghancurkan Kota Solo. Berbagai bangunan yang dianggap “berbau Tionghoa” di rusak, dibakar dan dijarah. Supermarket, plaza, gedung bioskop, hotel hancur dan mematikan sendi perekonomian masyarakat.

Biaya sosial dari Mei Kelabu ini harus dibayar oleh semua masyarakat tidak hanya dari etnis Tionghoa saja. Ikatan solidaritas masyarakat Solo dan sekitarnya tercerai berai, dan sosialisasi nilai-nilai kekerasan antar generasi pun terjadi. Ingatan masyarakat akan kerusuhan Mei 1998 tidak begitu saja mudah dilupakan. Trauma psikologis para korban selalu mengingatkan bagaimana kebrutalan massa pada waktu itu sangat tidak terkendali. Luapan emosi sesaat mampu menghancurkan bangunan-bangunan baik fisik dan sosial yang selama ini dibangun, hancur hanya dalam waktu sekejap.

Akar persoalan dari kerusuhan anti Tionghoa ini sampai sekarang masih menjadi perdebatan baik di kalangan etnis Tionghoa maupun Jawa. Persoalan banyak berujung pada proses saling menyalahkan satu sama lain dengan mencari pembenaran sendiri sehingga menambah runcingnya permasalahan. Sehingga, solusi penyelesaian dari masalah ini belum dianggap cukup untuk tidak mengulang lagi kerusuhan anti Tionghoa.

Padahal, keberadaan etnik Cina di Surakarta tidak dapat dilepaskan begitu saja karena mampu menjadi bandul perubahan tatanan sosial maupun ekonomi di Surakarta. Peran warga Cina dalam perkembangan ekonomi memang tak perlu diragukan seperti keberadaan Pasar Gede berawal dari pasar yang dibidani oleh masyarakat Cina. (Solopos, 15 Februari 2007). Seiring dengan perkembangannya maka terjadilah pembauran sosial antara etnik Cina dan Jawa yang terpusat di Kampung Pecinan “Balong”. Keberagaman tersebut mam-

pu memberikan warna baru bagi terjadinya kohesi sosial diantara mereka. Identitas kultural masing-masing tetap dibangun tanpa melalui penyeragaman. Beberapa simbol-simbol kultural Cina masih tetap bertahan dan memberikan saksi bisu bagi kelanggengan hubungan antar etnik.

Selain itu kebudayaan Cina juga telah membaur dengan kebudayaan masyarakat lokal seperti tradisi Cembengan yaitu mengarak sepasang batang tebu yang disinyalir merupakan salah satu tradisi masyarakat Cina sebagai hari ziarah. Salah satu contoh kongkrit dari pengakulturasi budaya Cina adalah dapat dilihat dari motif kain batik seperti burung Hong atau lebih dikenal burung Phoenix dan bentuk sulur (Solopos, 16 Februari 2007).

Dengan berbagai pembauran sosial ini terlihat sebuah pola ketahanan sosial yang dibangun antara etnik Cina dan Jawa yang harapannya mengurangi sumber-sumber konflik. Segala keberagaman kultural yang ada di Indonesia mampu menjembatani terjadinya kesatuan sosial masyarakat. Tetapi mengapa konflik antar etnis ini masih sering terjadi?

B. Pendekatan Struktural: Kebijakan Penyeragaman

Kebijakan pemerintah Indonesia yang tidak jelas berakibat kerusuhan sosial dimana warga Tionghoa menjadi sasaran merupakan wujud nyata persoalan Tionghoa tidak atau belum terselesaikan. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada era Orde Baru misalnya menjadi salah arah karena muncul persepsi bahwa loyalitas orang-orang Tionghoa dapat dicapai melalui pengingkaran ciri-ciri kultural. Pendekatan politik ini sangat kental dengan konsep penyeragaman sehingga mereduksi berbagai keunikan yang melekat dalam komunitas Tionghoa. (Jamuin, 2005). Selain itu berkaitan juga dengan konsep pembauran yang diartikan sebagai upaya menghapus atribut asal (*indigenous*) dan mengadopsi ciri baru yang dianggap *mainstream*.

Tabel 1.1
Kebijakan tentang Etnis Tionghoa di Indonesia

Tahun	Peristiwa
1900-an	Penggolongan secara diskriminatif oleh Pemerintah Hindia Belanda ke dalam 3 golongan yaitu: 1. Masyarakat Eropa 2. Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab) 3. Pribumi (penduduk asli) Penggolongan tersebut membuat Pemerintah Hindia Belanda memberikan hak-hak istimewa kepada orang keturunan Tionghoa misalnya penjualan candu bahkan hak untuk memungut pajak Adanya system pass dan zoning, pengelompokkan warga Tionghoa ke dalam wilayah tertentu sehingga memunculkan kampung peTionghoan (memberikan persepsi seolah-olah warga Tionghoa sangat eksklusif)
1960	Perpu No. 10 tentang pribumisasi pemerintah yang melarang warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk berdagang di tingkat pedesaan.
1965	Warga Tionghoa di bunuh dan ditangkap tanpa proses pengadilan atau prosedur yang jelas atas tuduhan komunisme
1967	Instruksi Presiden No. 14 tahun 1967 yang melarang agama, kepercayaan, ekspresi, seni, dan kebudayaan maupun sastra Tionghoa
1998	Sentiment anti-Tionghoa memuncak pada kerusuhan rasial 14-15 mei 1998
2000	Dikeluarkannya keputusan presiden No. 6 Tahun 2000 untk mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967 membuat ruang demokrasi mulai dibuka kembali

Sumber: diolah dari berbagai data

C. Pendekatan Perilaku: Enklusifisme Tionghoa

Melihat berbagai kebijakan yang diambil pemerintah, etnis Tionghoa secara individual dan komunal memilih menekuni satu-satunya bidang yang paling mungkin *survive* yaitu bidang bisnis (perdagangan). Hal ini menjadi motivator *survival of the fitness* yang menghasilkan ekkses-ekkses yang tidak sehat dalam iklim kehidupan komunitas Tionghoa ketika berinteraksi dengan komunitas lain non Tionghoa. (Rahardjo, 2005). Iklim yang tidak sehat ini juga akibat pola-pola segregasi sosial yang eksklusif secara berlebihan di kalangan komunitas Tionghoa. Implikasinya adalah berkembangnya praktek-praktek nepotisme dan patronase dalam relasi bisnis di kalangan etnis Tionghoa.

Persepsi sosial itu akhirnya berkembang ketika eksklusifisme di kalangan konglomerat yang berasal dari etnis Tionghoa terlibat dalam berbagai kolusi dengan penguasa.

Berbagai bentuk perilaku *plutokratis* (menguasai/mempengaruhi kekuasaan dengan kekayaan atau kekuatan uang) lalu menjalankan bisnis mereka dengan cara-cara kotor. Prasangka negatif lainnya yang dilekatkan dan dipelihara secara terus menerus adalah bahwa etnis Tionghoa itu pelit, binatang ekonomi, konglomerat pengeruk kekayaan negara, licik, tidak memiliki jiwa nasionalis,dll. Sedangkan orang Tionghoa memandang orang Jawa juga memiliki prasangka yang negatif bahwa orang Jawa itu malas, mau enaknyanya sendiri (suka meminta bantuan) dan kalau membayar utang tidak menepati janji. (Kinasih, 2005)

D. Pendekatan Culture: Penghilangan Jati Diri Etnis Tionghoa

Karakter yang dilekatkan pada masyarakat Tionghoa sebagai masyarakat eksklusif didasari pada semangat kekauman yang menjadi dasar bagi etnis Tionghoa. Ajaran

Konghucu mengajarkan semangat persaudaraan yang kuat sekali rasa kekauman, dan kekeluargaan yang kuat. Filosofi ini menjadi pegangan bagi masyarakat Tionghoa yang menyatakan bahwa "kolong langit adalah satu rumah dan di empat penjuru lautan adalah saudara". Pada saat rumah menjadi tempat berlindung pada saat bahagia maka kebahagiaan menjadi milik anggota keluarga lainnya. Kesadaran membagi kebahagiaan dengan sesamanya menjadi dasar interaksi masyarakat Tionghoa. Tidak ada kekuatan mengikat selain ikatan darah. (Kinasih, 2005)

Hal ini berakibat pada struktur keluarga yang patrilineal sehingga marga menjadi sangat penting. Karena pengaruh dari modernitas maka struktur keluarga Tionghoa mulai bergeser menjadi struktur keluarga baru (neolokal). Sebagai konsekuensinya maka lambat laun kehilangan ciri khas Tionghoa seperti nilai-nilai tradisional keluarga. Karakteristik lain yang hilang adalah berkaitan dengan agama. Tiga agama tradisional yang disebut Sam Kao (Taoisme, Budhisme, dan Konfusianisme) jelas kehilangan pengaruhnya karena tumbuhnya sentimen anti komunis.

E. Ketahanan Masyarakat: Model Pengelolaan Konflik Antar Etnis di Kota Solo

Lingkaran sengketa antar kedua etnis tersebut tidak pernah diselesaikan hingga kini. Negara justru membiarkan dan mengambil keuntungan dari situasi semacam ini. Akhirnya sengketa itu melebar meluas dan berubah bentuk menjadi kekerasan massal bahkan terjadi secara berulang-ulang.

Lantas bagaimana dengan kendali pemerintahan daerah Kota Solo menyelesaikan masalah ini? Saat ini Pemerintahan Kota Solo (Pemkot Solo) melakukan upaya-upaya pencegahan konflik dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola konflik. Program ini dinamakan "Pengembangan Ketahanan Masyarakat".

Program ketahanan masyarakat di Kota Solo selain bertujuan untuk menguatkan kembali lembaga dan mekanisme sosial yang mendukung terciptanya budaya damai dalam masyarakat juga bertujuan sebagai berikut:

1. Memahami dan memetakan akar konflik dan kekerasan
2. Memperoleh data mengenai tingkat dan besaran konflik
3. Menyusun model pengelolaan konflik
4. Mengembangkan aktivitas-aktivitas perdamaian
5. Membangun jejaring lintas etnis dan golongan

(Pedoman Praktis Kesbanglinmas Kota Solo, 2006)

Terciptanya ketahanan masyarakat atau komunitas tertentu merupakan sebuah gejala sosial yang dijadikan sebagai suatu antisipasi dari segala bentuk perubahan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Istilah ketahanan masyarakat dapat dikembangkan melalui upaya terjaringnya modal sosial yang ada di masyarakat. Baik modal sosial berupa norma dan jaringan sosial, ataupun kepercayaan sosial yang mampu mendorong tindakan kolektifitas demi mencapai manfaat bersama.

Program ketahanan masyarakat ini merupakan hasil dari kegiatan yang telah terlebih dahulu dilakukan Pemkot Solo bekerjasama dengan UNICEF dari tahun 2001 – 2005 dengan melalui kegiatan. Pemetaan awal yang telah dilakukan Tim Kesbanglinmas menyebutkan bahwa Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari sebagai wakil dari wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi dan Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan sedang. (Pedoman Praktis Kesbanglinmas Kota Solo, 2006)

Dan pada tahun 2006 dimulai program ketahanan masyarakat dengan membentuk kader-kader ketahanan masyarakat di ting-

kat kelurahan (ada 51 kelurahan). Setiap kelurahan masing-masing mengirimkan 2 warganya untuk diberikan pelatihan tentang ketahanan masyarakat. Dalam hal ini, ketahanan masyarakat dilakukan melalui empat tahap yaitu identifikasi dan analisis masalah, penyelesaian masalah, penilaian mandiri secara berkala, dan memelihara dan meningkatkan hasil yang dicapai.

Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ketahanan masyarakat ini dari mulai lokakarya, FGD dengan stakeholder sampai sosialisasi ke tingkat kelurahan. Hasil sementara masih banyak kelurahan yang belum merespon terhadap program ini. Hal ini menurut analisis tim Kesbanglinmas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi kota.

Terlepas berhasil atau tidaknya program ini di masa mendatang, tampaknya niat baik Pemkot Solo ini perlu mendapat dukungan. Karena dengan melalui fasilitasi Pemkot Solo ini, kepentingan antar warga di tingkat kelurahan dipertemukan dan ini sangat baik bagi hubungan antar warga kota. Menurut analisa fungsionalisme, masyarakat mendahului individu. Individu dicetak, ditekan dan dipengaruhi lingkungannya. Dengan demikian, kepentingan individu mencerminkan "kesadaran kolektif" atau sistem nilai masyarakat. Dalam menganalisa suatu masyarakat, maka tekanan ini disalurkan melalui mekanisme dimana institusi-institusi sosial diintegrasikan satu sama lain untuk mempertahankan keteraturan sosial yang sudah ada (Jhonson, 1990:102).

Menurut Durkheim, realitas dilihat sebagai hasil komunikasi antara kenyataan sosial dan kesadaran. Masyarakat bukan hanya realitas melainkan juga milieu yang melahirkan ide tentang apa yang real itu. Oleh karena itu, individu haruslah terikat pada masyarakat, terikat pada kolektivitas. Karena perlunya suatu ikatan kolektivitas yang mampu menjembatani antara kesadaran individu dengan kesadaran kolektivitas,

semakin besar perubahan sosial yang terjadi sehingga semakin diperlukan sebuah perantara dalam bentuk organisasi untuk mencegah kecenderungan disintegrasi. Kalau kesadaran kolektif cukup kuat maka kesadaran itu mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk menetralkan perbedaan-perbedaan, sehingga menjadi tambah sensitif terhadap pelanggaran yang semula dianggap sebagai hal yang biasa (Soekamto, 1985).

Hal ini senada dengan pemikiran Rochwan Achwan yang melihat lembaga-lembaga solidaritas yang ada di masyarakat merupakan sebuah jembatan untuk menyederhanakan dan mengurangi ketidakpastian di dalam kehidupan sosial. Berbagai konflik sosial yang melibatkan ketegangan antar etnis serta masalah sosial lainnya dapat menghilangkan "*social trust*" di dalam masyarakat. Akibatnya dapat merenggangkan ikatan solidaritas antar masyarakat. Dan akhirnya ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga solidaritas yang menjadi penopang ketahanan komunitas tersebut, mulai mengalami penciutan, keretakan, bahkan kelumpuhan. (Hikmat, 2003:6)

Di satu sisi, menurut Muhadjir Effendi yang memperkenalkan "Masyarakat Equilibrium", menegaskan bahwa sebuah perubahan yang terjadi di Indonesia harus dibarengi dengan keseimbangan. Karena tanpa keseimbangan, perubahan justru akan menghasilkan ketimpangan dan rusaknya tatanan sosial. Perubahan yang diiringi dengan keseimbangan inilah yang akan mewujudkan masyarakat equilibrium. Dengan didukung nilai kebenaran yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Tanpa itu, akan menimbulkan suasana yang dalam dunia psikologi disebut *itensi paradoksi* (pertentangan yang intens). Apalagi, jika pada kenyataannya terjadi proses benturan-benturan nilai yang ada dalam masyarakat, maka hal itu tidak akan mengarahkan terciptanya *new equilibrium* tetapi menciptakan *disequilibrium* baru. (Effendy, 2002:12-13). Itulah

sebabnya, menurut Durkheim dalam kehidupan sosial perlu adanya solidaritas sosial yang terbentuk dalam masyarakat sebagai proses keseimbangan.

Berbagai perubahan kebijakan politik yang menyangkut Etnis Tionghoa menyebabkan keberadaan mereka sebagai etnis minoritas semakin termajinalkan khususnya di Era Orde Baru. Misalnya adanya pelarangan penggunaan segala macam bentuk simbol-simbol kebudayaan Cina (Tionghoa) termasuk perayaan hari besarnya seperti Imlek. Pengakuan terhadap identitas kultural sebagai sebuah hak yang perlu dimiliki oleh setiap kelompok etnis, diingkari oleh pemerintahan Orde Baru saat itu. Masyarakat Etnis Tionghoa hanya diberi ruang untuk melakukan bisnis semata.

Hasil penelitian Departemen Sosial RI yang dilakukan di empat propinsi (Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah) menunjukkan bahwa konflik (perubahan sosial) pada tingkat yang paling parah, mengendurkan pranata sosial. Karena, konflik adalah suatu klimaks dari suatu proses panjang dimana masuk dan berkembangnya "virus-virus sosial" ke dalam masyarakat. Konflik berat dalam wujud perusakan harta benda hingga nyawa manusia sebenarnya adalah hasil akumulasi proses sosial yang keropos. Oleh karena itu, perlunya memberdayakan pranata sosial dalam kerangka mencegah dan mengantisipasi terulang kembalinya konflik sosial. (Muttaqin, 2002:1)

Ketahanan masyarakat atau *Communiti Resilience* yang dikembangkan Pemkot Solo merupakan kemampuan masyarakat mengelola berbagai gangguan, hambatan, ancaman, dan tantangan yang mempunyai potensi konflik dan kekerasan dalam rangka mencapai kehidupan yang harmoni. Harapan Pemkot Solo dengan program ketahanan masyarakat ini adalah:

1. Terbangunnya kesadaran warga akan pentingnya budaya damai dan kesedia-

an warga untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya damai

2. Menguatnya peran lembaga-lembaga formal dan informal di masyarakat dalam mengupayakan perdamaian.
3. Menguatnya peran tokoh-tokoh masyarakat, agama, etnis dan kepemudaan dalam mengupayakan perdamaian
4. Tersedianya data yang lengkap tentang pola-pola konflik di masyarakat
5. Terciptanya mekanisme damai dalam pengelolaan konflik di masyarakat
6. Adanya dokumentasi tentang kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang berkembangnya perdamaian yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

(Pedoman Praktis Kesbanglinmas Kota Solo, 2006)

Terciptanya ketahanan masyarakat diindikasikan dengan kemampuan segenap komponen pemerintah, asosiasi lokal, pengusaha, lembaga swadana masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga keagamaan, guna melakukan *peace keeping* (menjaga perdamaian), antisipasi konflik, resolusi konflik, dan *social recovery* dalam proses kehidupan sosial (Kartono, 2005:39). Selain itu, komponen-komponen inilah pula yang perlu memelihara dan memainkan fungsinya sebagai adaptasi, integrasi, goal-attainment, dan latence-pattern Maintenance. Agar, ketahanan masyarakat bukan sebuah impian semata dalam kondisi sosial yang tidak menentu seperti sekarang ini.

Karena apabila dilihat dari perspektif konflik, setiap masyarakat akan selalu mengalami konflik akibat perubahan yang mengelilinginya. Konflik merupakan gejala alamiah dan tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sosial. Konflik adalah realitas sosial yang tidak mungkin dihilangkan namun dapat diperkecil atau dibatasi sebarannya. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan akan ada upaya yang sistematis untuk mengelola konflik dalam bentuk pencegahan

an ataupun penyelesaian konflik (Muttaqin, dkk, 2003:10).

Durkheim melihat konflik sebagai bagian dari kondisi yang anomie. Konflik sebagai fungsi-fungsi antar elemen di dalam sistem sosial. Yakni, kondisi pertentangan yang dialami masyarakat dalam masa tertentu buah dari kehilangan kendali norma dan nilai-nilai sosial yang telah ada (Poloma, 1994). Goerge Simmel, salah satu tokoh dari aliran fungsionalisme, menganalisa konflik juga dalam arti keberfungsian. Dalam bukunya *Conflict: The Web Of Affiliation Group* (1955), Simmel mengatakan bahwa struktur sosial adalah suatu gejala yang mencakup di dalamnya berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisah-pisahkan, namun dapat dibedakan dalam analisa. Artinya, dalam kehidupan sosial, konflik itu dapat menjadi penyebab ataupun pengubah kepentingan-kepentingan kelompok, organisasi, kesatuan-kesatuan, dan sebagainya. Konflik juga dapat mengatasi ketegangan-ketegangan antara hal-hal yang bertentangan sehingga mencapai perdamaian.

Di sini, konflik tidak harus dianggap sebagai penghancur sistem sosial, namun juga dilihat sebagai perekat dan pembangun integrasi sistem sosial itu sendiri. Perasaan alamiah dalam manusia adalah sumber terjadinya konflik. Dalam buku *The Functions of Social Conflict* (1956), Lewis Coser mempertegas argumen Simmel bahwa konflik itu bisa menjadi salah satu media integrasi, persemaian yang subur bagi terjadinya perubahan sosial, serta penguatan identitas suatu kelompok sosial (*social group*). Kelompok sosial tertentu akan menjadi semakin kuat dan erat ketika mereka memiliki dan menghadapi lawan atau musuh dari kelompok sosial lainnya (Poloma, 1994).

Oleh karena itu pengembangan ketahanan masyarakat tidak hanya sekedar pada upaya mengubah perubahan menjadi peluang dan kesempatan tetapi harus mampu memberikan solusi konflik dan pencegahannya. Sebuah konsep ketahanan masyarakat yang lain menawarkan pemahaman bahwa ketahanan sosial diperlukan pada status sehat (sebagai antibody) dan pada status sakit (sebagai obat). Menurut Rochwan Achwan, suatu komunitas dianggap memiliki ketahanan masyarakat apabila:

1. Mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari kelompok perubahan sosial yang mempengaruhinya
2. Mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan
3. Mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

(Hikmat,dkk, 2004:7)

Ketahanan masyarakat menggambarkan kemampuan internal masyarakat dalam menggalang konsensus dan mengatur sumber daya maupun kemampuannya mengantisipasi faktor eksternal menjadi sumber ancaman menjadi peluang. Oleh karena itu ketahanan masyarakat tidak hanya dilihat sebagai *final or finish product* tetapi juga *process or dynamic product* (Hikmat,dkk, 2004:22). Ketahanan masyarakat tidak dapat diartikan dalam batas-batas "*social defence*" pada konteks statis, tetapi perlu dimaknai pula sebagai "*social resilience*" yang lebih bercorak dinamis. Mungkinkah langkah yang diambil Pemkot Solo dengan mengembangkan ketahanan masyarakat mampu mewujudkan masyarakat kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali?

Daftar Pustaka

- Coser, Lewis A.,(1956), *The Function of Social Conflict*, New York: The Free Press
- Effendi, Muhadjir, (2002) *Masyarakat Equilibrium*, Yogyakarta, Benteng Budaya
- Hikmat, Harry,dkk, (2004), *Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat (Kajian Konseptual dan Empirik)*, Jakarta, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI
- Jamuin, Ma'arif (2001), *Memupus Silang Sengkarut Relasi Jawa Tionghoa*, Surakarta, Ciscore & The Asia Foundation
- Johnson, Doyle Paul, (1990), *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Kartono, Drajat Tri, (2004), *Pembentukan Sistem Ketahanan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan*, Surakarta, UNS Press
- Kinasih, Ayu Windy (2005), *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM
- Muttaqin,dkk, (2003) *Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Penanganan Konflik*, Jakarta, Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Departemen Sosial RI
- Poloma, Margareth, (1994) *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, Turnomo, (2005), *Menghargai Perbedaan Kultural (Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Simmel, George, (1955), *Conflict & Web of Group-Affiliation*, Illinois: The Free Press
- Soekamto, Soerjono, (1985) *Aturan-Aturan Metode Sosiologis* (Seri Pengenalan Sosiologi 2 Emile Durkheim), Jakarta, CV Rajawali
- Thung Ju Lan, (1999), *"Konflik Cina – Non Cina" Etnisitas dan Kekuasaan*, dalam Proceedings Lokakarya Etnisitas dan Konflik Sosial di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)

Sumber pusataka lainnya:

- Tim Kota Solo, (2006), *Pedoman Praktis Prose Pengembangan Ketahanan Masyarakat Di Kota Solo*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Solopos, 15 Februari 2007
- Solopos, 17 Mei 2007